

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

--



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, Hal. 9	7 Desember 2019	Jakarta&Banten Makin Terintegrasi	Keberadaan Jalan Tol Kunciran-Serpong diharapkan semakin meningkatkan konektivitas antara Banten dan Jakarta, terutama di sektor industry dan logistik
2	Bisnis Indonesia, Hal. 12	7 Desember 2019	8 Bendungan Dikebut	Pemerintah memberikan dukungan kebutuhan air baku untuk pengembangan calon ibu kota negara dengan merencanakan pembangunan delapan infrastruktur sebagai sumber pengambilan air baku
3	Kompas, Hal 13	7 Desember 2019	Infrastruktur Bandara Saja Tidak Cukup	Pembangunan sejumlah infrastruktur di Provinsi DIY tidak akan cukup mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Setelah proyek selesai, Pemprov DIY diharapkan menarik investasi untuk menumbuhkan ekonomi yang berdampak pada masyarakat luas
4	Kompas, Hal 15	7 Desember 2019	Jabodetabek Kian Terhubung	Pengoperasian jalan tol ruas Kunciran-Serpong mendukung mobilitas barang dan orang di Jabotabek. Jaringan Tol Lingkar Luar Jakarta II ditargetkan beroperasi tahun 2020
5	Bisnis Indonesia, Hal. 10	9 Desember 2019	Sengkarut Lahan di Ranah Minang	Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang menjadi satu-satunya proyek strategis nasional (PSN) di Sumatera Barat mandek karena ada penolakan dari pemilik lahan
6	Bisnis Indonesia, Hal. 23	9 Desember 2019	Pengadaan Lahan Diefektifkan	Pengadaan lahan masih menjadi salah satu kendala yang kerap dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia
7	Bisnis Indonesia, Hal. 8	9 Desember 2019	Jateng Jamin Regulasi dan Lahan	Pemprov Jateng tengah meminta pemerintah kota/kab menjamin kenyamanan investor dengan memberikan kepastian regulasi dan perolehan lahan
8	Bisnis Indonesia, Hal. 13	9 Desember 2019	Pengoperasian Tol Japek II Mundur ke 20 Desember	Pemerintah memundurkan rencana pengoperasian tol layang Jakarta-Cikampek (JepekII) dari semula 15 Desember menjadi 20 Desember.
9	Bisnis Indonesia, Hal. 16	9 Desember 2019	2021, Nadiem tidak lagi Urus Sekolah Rusak	Dengan melimpahkan urusan rehab sekolah rusak ke PUPR, Kemendikbud bisa berkonsentrasi penuh mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia
10	Tempo, hal 4	9 Desember 2019	Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Beroperasi 20 Desember	rencana pengoperasian tol layang Jakarta-Cikampek (JepekII) hanya berlaku untuk kendaraan golongan I

Judul	Jakarta&Banten Makin Terintegrasi	Tanggal	7 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 9		
Resume	Keberadaan Jalan Tol Kunciran-Serpong diharapkan semakin meningkatkan konektivitas antara Banten dan Jakarta, terutama di sektor industri dan logistik		

► TOL KUNCIRAN-SERPONG

Jakarta & Banten Makin Terintegrasi

Bisnis, TANGERANG SELATAN — Keberadaan jalan Tol Kunciran-Serpong diharapkan semakin meningkatkan konektivitas antara Banten dan Jakarta, terutama di sektor industri dan logistik.

Presiden Joko Widodo mengatakan ada tiga alasan ruas Tol Kunciran-Serpong tersebut penting kehadirannya. “*Pertama*, jalan tol ini mempercepat dan memperlancar konektivitas Banten-Jakarta,” katanya dalam acara peresmian ruas Tol Kunciran-Serpong, di Tangerang Selatan, Jumat (6/12).

Menurutnya, jika konektivitas terhambat maka terjadi kerugian besar, baik dari sisi waktu dan biaya konsumsi bahan bakar. *Kedua*, kawasan industri yang ada di Jakarta dan Banten akan semakin terintegrasi sehingga distribusi logistik akan lebih lancar.

Jokowi mengatakan ruas tol sepanjang 11,135 kilometer ini akan menghubungkan sentra produksi dan sentra distribusi di dua kota tersebut dan meningkatkan daya saing di sektor investasi.

Ketiga, peresmian tol yang dikelola oleh PT Marga Trans Nusantara - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) hasil konsesi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Astra Tol Nusantara, dan PT Transutama Arya Sejahtera - mempercepat

gerak perekonomian Banten sebagai wilayah penyangga Ibu Kota.

“Kejenuhan investasi di Jakarta bisa dilimpahkan ke Banten karena konektivitas ke Banten lebih tersambung sehingga perekonomian Banten bisa bergerak lebih cepat,” ujar Presiden.

Ruas Tol Kunciran-Serpong pun menjadi ruas pertama dari rangkaian ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) II yang selesai konstruksinya dan siap dioperasikan pada Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019/2020 tahun ini.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan bahwa diharapkan dengan keberadaan ruas tol ini akan memindahkan jalur logistik dari dalam kota ke luar kota melalui JORR II.

Menurutnya, alur distribusi truk peti kemas tidak lagi melalui JORR I melainkan JORR II. “*Container* barang harapan kita tidak melalui ruas yang JORR I tapi JORR II. Arus barang dari Bandara [Soekarno Hatta] ke kawasan barat dan timur bisa berlangsung lebih baik.”

Danang mengatakan bahwa JORR II sepanjang 110 kilometer akan selesai dan siap dioperasikan pada akhir tahun depan. (Aprianus Dani)

Judul	8 Bendungan Dikebut	Tanggal	7 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 12		
Resume	Pemerintah memberikan dukungan kebutuhan air baku untuk pengembangan calon ibu kota negara dengan merencanakan pembangunan delapan infrastruktur sebagai sumber pengambilan air baku		

► INFRASTRUKTUR CALON IBU KOTA NEGARA

8 Bendungan Dikebut

Bisnis, SEPAKU — Pemerintah memberikan dukungan kebutuhan air baku untuk pengembangan calon Ibu Kota Negara, dengan merencanakan pembangunan delapan infrastruktur sebagai sumber pengambilan air baku.

Anitana W. Puspa
anitana.puspa@bisnis.com

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Anang Muchlis mengatakan bahwa di Provinsi Kalimantan Timur telah ada enam infrastruktur sumber pengambilan air baku.

Sumber air baku tersebut meliputi Bendungan Manggar dengan kapasitas tampung 14,2 juta m³, Bendungan Teritip (2,43 juta m³), Embung Aji Raden (0,49 juta m³), yang ketiganya berada di Balikpapan.

Selanjutnya, Bendungan Samboja di Kutai Kartanegara (5,09 juta m³), Intake Kalhol Sungai Mahakam (0,02 juta m³), dan Bendungan Lempake di Samarinda (0,67 juta m³). "Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan delapan infrastruktur sumber air baku yang masuk dalam rencana pendukung air baku di Kaltim," katanya, Jumat (6/12).

Delapan infrastruktur tersebut yakni Bendungan Sepaku Semoi (Penajam Pasar Utara), Bendungan Samboja II, Intake Loa Kulu Sungai Mahakam, Ben-

dungan Lambakan, Bendungan Beruas, Bendungan Safiak, Bendungan Batu Lepek Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Bendungan ITCHI.

Pemerintah memprioritaskan pembangunan bendungan Batu Lepek di Kutai Kartanegara segera dilelang sebagai proyek untuk pasokan air baku utama bagi lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimuljono mengatakan, bendungan Batu Lepek memiliki kapasitas 14.300 liter per detik. "Saat ini bendungan tersebut dalam tahap desain untuk bisa mulai lelang pada tahun depan. Pelelangannya konsepnya *design and build*. Jadi berbarengan dalam desain dan pembangunan supaya tak memakan waktu," katanya di Sepaku.

Dua bendungan kecil lainnya Beruas dan Safiak dengan kapasitas dan ukuran lebih kecil yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengembangan wisata dan taman hiburan di wilayah IKN.

Pembangunan bendungan di lokasi IKN lainnya yakni Sepaku—Semoi yang akan lebih banyak dialirkan ke Sepaku. Proyek bendungan Sepaku—Semoi akan dilelang pada awal Januari 2020 dengan nilai investasi yang

diperkirakan mencapai Rp700 miliar.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyesuaikan besaran ganti rugi untuk pembebasan lahan mencapai 300 hektare yang sebagian di antaranya milik warga.

Menteri Basoeki menekankan bahwa ketersediaan air baku baik di kota penyangga seperti Samarinda maupun Balikpapan sama saja dengan Kaltara yakni Tanjung Selor dan sekitarnya yang kekurangan air baku.

Basuki menjelaskan, untuk kota Samarinda dan Balikpapan potensi untuk Bendungan memang kecil. Ada Bendungan Teritip yang baru selesai dibangun, kemudian Bendungan Manggar, dan Bendungan Samboja. "Untuk IKN kami sudah melakukan desainnya, sebelum di-launching Ibu Kota baru, kami sudah melakukan survei air bersih."

MENJADI PRIORITAS

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam kunjungan kerja di Balikpapan menyebutkan, penyediaan sumber daya air bersih harus segera dipikirkan sebagai prioritas.

"Nanti, jika IKN terbentuk seperti hukum alam, di mana ada gula semut akan datang. gulanya Ibu Kota Negara baru tentunya semua orang akan datang, juga investasi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan untuk merombak 43 regulasi dalam rangka menyiapkan landasan hukum bagi pembangunan IKN di Kaltim. ■

► Pemerintah memprioritaskan pembangunan bendungan Batu Lepek di Kutai Kartanegara.

Judul	Infrastruktur Bandara Saja Tidak Cukup	Tanggal	7 Desember 2019
Media	Kompas, Hal 13		
Resume	Pembangunan sejumlah infrastruktur di Provinsi DIY tidak akan cukup mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Setelah proyek selesai, Pemprov DIY diharapkan menarik investasi untuk menumbuhkan ekonomi yang berdampak pada masyarakat luas		

EKONOMI DIY

Infrastruktur Bandara Saja Tidak Cukup

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pembangunan sejumlah infrastruktur di Provinsi DI Yogyakarta tidak akan cukup mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Setelah proyek infrastruktur selesai, Pemprov DIY diharapkan menarik investasi untuk menumbuhkan ekonomi yang berdampak pada masyarakat luas

"Kalau tidak mendatangkan investasi, pembangunan infrastruktur itu sia-sia sebenarnya," kata dosen Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta, Murti Lestari, Jumat (6/12/2019), di Yogyakarta.

Beberapa tahun terakhir, ada sejumlah proyek infrastruktur besar di DIY. Salah satunya Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) DIY, pembangunan bandara itu mendorong pertumbuhan

ekonomi DIY tahun 2018 dan 2019.

Pada 2018, pertumbuhan ekonomi DIY 6,2 persen atau naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang hanya 5,3 persen. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan 6,3-6,7 persen.

Perkiraan BI DIY, pertumbuhan ekonomi tahun depan turun jadi 5,3-5,7 persen karena pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta bakal selesai akhir tahun ini.

Menurut Murti yang juga tenaga ahli Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, demi menjaga pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur harus diikuti masuknya investasi. Pemprov berencana menggaet investasi memanfaatkan infrastruktur, salah satunya pengembangan kawasan aerotropolis di dekat Bandara Internasional Yogyakarta. Aerotropolis merupa-

kan kota dengan tata letak, infrastruktur, dan perekonomian berpusat pada bandara.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, ada sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi daya tarik investasi. Ada proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta dan Tol Yogyakarta-Solo, pembangunan rel kereta api menuju bandara internasional, dan proyek Jalur Jalan Lintas Selatan.

Pemda DIY juga berencana mengembangkan proyek yang bisa menjadi peluang investasi bagi investor. Selain pengembangan kawasan aerotropolis, Pemda DIY juga berencana mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Parangtritis di Kabupaten Bantul.

Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo menambahkan, pemda siap membantu dan memudahkan investor yang ingin menanamkan modal. (HRS)

Judul	Jabodetabek Kian Terhubung	Tanggal	7 Desember 2019
Media	Kompas, Hal 15		
Resume	Pengoperasian jalan tol ruas Kunciran-Serpong mendukung mobilitas barang dan orang di Jabodetabek. Jaringan Tol Lingkar Luar Jakarta II ditargetkan beroperasi tahun 2020		

Jabodetabek Kian Terhubung

Pengoperasian jalan tol ruas Kunciran-Serpong mendukung mobilitas barang dan orang di Jabodetabek. Jaringan Tol Lingkar Luar Jakarta II ditargetkan beroperasi tahun 2020.

JAKARTA, KOMPAS — Ruas Jalan Tol Kunciran-Serpong dinilai bakal memperlancar arus barang dan jasa antara DKI Jakarta dan Banten. Ruas itu juga memperpanjang jaringan Tol Lingkar Luar Jakarta atau JORR II yang melingkupi wilayah Jabodetabek.

Presiden Joko Widodo saat meresmikan ruas Tol Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (6/12/2019), mengatakan, terhambatnya konektivitas antara wilayah Jakarta dan Banten turut menggerus daya saing. Hal itu karena beban atau biaya bertambah besar, antara lain karena kemacetan dan pemborosan bahan bakar.

"Ke depan wilayah-wilayah di sekitar Jakarta akan makin terintegrasi sehingga distribusi makin mudah dan cepat. Jadi, (jalan tol) akan menyambungkan sentra-sentra produksi dan distribusi sehingga meningkatkan daya saing produk-produk kita," kata Presiden.

Dalam peresmian itu, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,

Jaringan Jalan Tol Jabodetabek



Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Purikesit, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arrayani, serta Direktur PT Astra International Tbk Paulus Bambang Widjanarko Santoso.

Panjang ruas Tol Kuncir-

an-Serpong adalah 11,2 kilometer. Tol itu akan tersambung dengan ruas Cengkareng-Batucaepur-Kunciran dan Serpong-Cinere yang menjadi bagian dari JORR II. Ruas JORR II nantinya terbentang dari timur sampai ke barat terdiri dari Cibitung-Cilincing, Cimanggis-Cibitung, Cinere-Jagorawi, Serpong-Cinere, Kunciran-Ser-

pong, dan Cengkareng-Batucaepur-Kunciran dengan total panjang 110 kilometer.

Target selesai

Secara khusus Presiden berharap agar jalan tol dapat turut mendorong pergerakan ekonomi di Banten. Dengan ekonomi yang bergerak lebih cepat, lapangan kerja juga diharapkan

lebih banyak tercipta.

JORR II merupakan bagian dari pembangunan jalan bebas hambatan penghubung kota-kota di wilayah metropolitan Jabodetabek. Rencana jaringan jalan bebas hambatan itu sudah ditetapkan sejak 1980-an. Jaringan itu terdiri dari Tol Dalam Kota (51 km), Tol JORR (74 km), dan Tol JORR II (110 km).

Ruas-ruas lain di JORR II ditargetkan selesai bertahap. Ruas Cinere-Cengkareng, misalnya, ditargetkan selesai Mei 2020. Sementara Cimanggis-Cibitung direncanakan selesai dan beroperasi semester II-2020.

Tol Kunciran-Serpong dibangun PT Trans Marga Nusantara dengan investasi Rp 4 triliun dan masa konsesi 35 tahun. Pemerintah masih akan membahas soal tarif bersama badan usaha sehingga penggunaannya masih digratiskan.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan, ke depan, Tol JORR II dimaksudkan untuk memindahkan lalu lintas angkutan barang yang biasanya masuk kota, baik yang menuju Tangerang maupun Tol Jakarta-Cikampek. (NAD/NTA)

Judul	Sengkarut Lahan di Ranah Minang	Tanggal	9 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 10		
Resume	Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang menjadi satu-satunya proyek strategis nasional (PSN) di Sumatera Barat mandek karena ada penolakan dari pemilik lahan		

PROYEK TOL TRANS-SUMATRA

Sengkarut Lahan di Ranah Minang

Proyek jalan Tol Padang—Pekanbaru yang menjadi satu-satunya proyek strategi nasional (PSN) di Sumatera Barat mandek karena ada penolakan dari pemilik tanah. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pembangunan ruas tol yang tersendat, Bisnis menerbitkan tim ke lapangan. Hasil reportase tersebut kami sajikan dalam tiga laporan khusus yang dimulai hari ini, Senin (9/12) sampai dengan Rabu (11/12).

Wahid Maslinda & Rhyza Maslinda
wmaslinda@bisnis.com

Hujan rintik-rintik mulai membasahi Nagari Sicincin saat Binis menyambangi kebun milik Ade Hidayat, Nagari yang masuk wilayah Kecamatan 2x11 Ekan Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, itu menjadi salah satu lokasi proyek jalan tol Padang—Pekanbaru seksi Padang—Sicincin sejauh 30,4 kilometer.

Ade dan orang tuanya mempunyai sebidang tanah dan bangunan serta lahan pertanian dengan luas 1,5 hektare. Posisi lahan tepat di pinggir jalan lintas Padang—Bukittinggi. Belakangan, Ade cemas karena khawatir tanah milik keluarganya bakal dihargai murah seperti yang terjadi di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai.

Nagari Kasang merupakan salah satu lokasi pembangunan jalan Tol Padang—Sicincin, mulai dari STA KM 0 sampai dengan STA KM 4,2. Di lintasan itu, penetapan lokasi sudah diterbitkan. Berdasarkan hasil penilaian kantor jasa penilaian publik, harga tanah di sana dihargai berkisar Rp52.000 sampai dengan Rp288.000 per meter persegi.

"Kami masyarakat sadar, ini untuk pembangunan, tetapi janganlah dibekas seperti [penjualan] di Kasang itu, ada yang Rp50.000, Rp60.000! Mauk tanah kami dihargai sekor ayam potong," ujarnya kepada Binis, Selasa (3/12).

Menurut Ade, di Nagari Sicincin, harga tanah di samping jalan raya layak dihargai paling mahal, berkisar Rp1 juta per meter persegi. Sementara itu, lahan pertanian berupa sawah dibanderol Rp700.000 per meter persegi. Makin menjorok ke dalam, bisa makin rendah. Lokasi menentukan harga.

Selain Ade, Binis juga menemui empat warga pemilik tanah lain. Mereka memiliki lahan mulai dari 1 hektare hingga 4 hektare. Mereka mewakili pendapatnya kepada Ade yang saat ini menjabat Wali Korong atau serupa Ketua Rukun Tetangga.

Empat warga yang ditemui Binis menemui kejelasan terkait dengan kepastian proyek jalan Tol Padang—Sicincin. Ade mengatakan sejauh ini pihaknya sudah beberapa kali mendapat undangan musyawarah. Tim survei juga kerap berstandar melakukan pengukuran. Ade menunjukkan satu patok berwarna merah dengan tinggi sekitar 20 sentimeter. Patok itu terletak sekitar 100 meter dari rumahnya. Beberapa kali musyawarah diadakan, belum ada titik terang soal berapa harga yang ditawarkan pemerintah.

"Kami ingin jelas saja, jadi tidak proyeknya. Kalau jadi, harganya jelas dan pantas. Tidak ada masalah lain, apalagi politik," terangnya. Ketidakejelasan terkait dengan harga ini juga memicu penduduk di Korong Padang Laweh, masih di Nagari Sicincin. Wali Korong Padang Laweh Irwandi mengatakan ada sekitar 100 kepala keluarga yang terdampak rencana pembangunan jalan tol.

Sejauh ini, warga sudah mengikuti sedikinya enam kali musyawarah, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Irwandi menekankan bahwa belum ada kejelasan perihal harga lahan yang akan dibayarkan.

"Selama ini, kami hanya ditanya setuju atau tidak setuju. Tidak pernah dijelaskan harga tanahnya sekian. Kami takut ini seperti jebakan saja," terang Irwandi.

Belum terang soal harga, warga Sicincin sebelumnya juga menolak pembangunan jalan tol melewati kawasan produktif. Penolakan serupa juga terjadi di Nagari Singgaling, Kecamatan Lubuk Alung.

"Kawasan produktif, selain menjadi lokasi permukiman padat juga menjadi pusat kegiatan ekonomi Nagari Sicincin. Ade menunjukkan kepada Binis lokasi permukiman padat yang bakal tersusur bila mengacu pada trase yang lama.

Pimpinan Proyek Jalan Tol Padang—Sicincin PT Hutama Karya (Persero) Rantos Pandede mengatakan lokasi trase yang ditolak warga Lubuk Alung berada di STA 17, sedangkan di Sicincin terletak di STA 30.

Da menerangkan saat ini Hutama Karya sebagai badan usaha yang mendapat penugasan untuk menggarap jalan tol Padang—Sicincin telah mengajukan persetujuan desain pada trase sepanjang STA km 4,2.

"Kemungkinan trase akan bertambah ke [kilometer] 38,1, ke arah Kayu Tanam yang disebut 'Dark City,' jelasnya kepada Binis, Rabu (4/12).

HAL LUMRAH

Penolakan dari warga Sicincin dan Lubuk Alung sudah diajukan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan penolakan masyarakat merupakan hal lumrah. "Tidak ada yang bisa menghambat kegiatan pembangunan yang sifatnya strategis untuk kepentingan masyarakat banyak," ujarnya kepada Binis di sela-sela acara pengelaran musik di Universitas Negeri Padang, Rabu (4/12).

Irwani menegaskan PUPR siap menerbitkan penetapan lokasi untuk STA KM 4,2 hingga STA KM 30,4. Sebelumnya, penetapan lokasi untuk STA KM 0—STA km 4,2 sudah diterbitkan sejak 2018.

Menurut Irwani, pihaknya sedang menunggu surat dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Surat itu menjadi modal bagi pemerintah untuk menerbitkan penetapan lokasi. Lokasi yang baru, ujarnya, sudah disetujui warga karena mengakomodasi keinginan mereka untuk mengalihkan trase ke arah jalan lingkar Duku—Sicincin.

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Darmansyah menambahkan surat yang dimaksud gubernur adalah pemecatan revisi dokumen pemecatan pengalihan tanah STA 4,2 KM—STA 30,4 km.

Dia menyebutkan pihaknya sudah berdiskusi surat tiga kali ke Dirjen Bina Marga. Surat terakhir dikirim pada 11 November 2019.

Dalam Surat Gubernur Sumatera Barat No. 759/1288/Perkimtan-Tnh/2019, gubernur berharap agar Dirjen Bina Marga menyampaikan revisi dokumen pemecatan pengalihan tanah (DPPT) guna mempercepat proses penetapan lokasi, terutama di lokasi yang tidak ada penolakan.

Pemecatan ini dilayangkan guna menghindari keresahan pemilik lahan terkait dengan kepastian pembangunan jalan tol.

"Karena ada penolakan, secara hukum DPPT dikembalikan dan harus dilakukan revisi. Kami sudah berdiskusi surat tiga kali [ke Dirjen Bina Marga]. Kalau revisi DPPT siap, kami siap menerbitkan penlok [penetapan lokasi]," jelas Darmansyah, Kamis (5/12).

Menurutnya, selama belum ada revisi DPPT, penetapan lokasi belum bisa diterbitkan gubernur. Bila penlok belum juga arbi, proses pembebasan lahan, termasuk penilaian harga tanah belum bisa dimulai.

Dengan kata lain, proses pembebasan lahan di STA KM 4,2—STA KM 30,4 belum bisa dimulai karena belum ada penlok. Oleh karena itu, penilaian harga tanah dan tegakan di atasnya sebagai dasar musyawarah ganti rugi kepada pemilik lahan belum bisa dimulai.

Di lain pihak, Kementerian PUPR memastikan bahwa pihaknya mengakomodasi keinginan warga terdampak untuk meminimalkan trase rencana jalan tol.

Dirjen Jalan Besar Hambatan dan Perbaikan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadani mengatakan pengalihan trase akan mengikuti mekanisme yang berlaku terkait dengan proses pengalihan lahan.

Dia menyampaikan proses pengalihan lahan sempat tertahan karena ada penolakan saat konsultasi publik. Kementerian PUPR, utamanya, terus bersinergi dengan pihak terkait guna mencari alternatif trase yang terbaik.

Ketika Binis meminta konfirmasi terkait dengan Surat Gubernur Sumbar tertanggal 11 November 2019, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya sudah merespons surat Gubernur Sumbar.

"Sudah dibahas," ujar Basuki di sela-sela perseremoni jalan tol Kuncian—Serpong di Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (6/12).

Proyek Jalan Tol Padang—Sicincin sudah memulai konstruksi sejak 2018 dengan seremoni pemancangan tiang perdana (groundbreaking) oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2019.

Hingga saat ini, penetapan lokasi baru dilakukan sejauh 4,2 kilometer. Dari jumlah itu, konstruksi baru berjalan sepanjang 1,1 kilometer di dua zona yang terpisah. Bila sengkaret tak menemui titik terang, penyelesaian proyek jalan tol pertama di Sumbar itu berpotensi semakin tertunda-lambat.

(Harian Day Today)

PROGRES PENGEMBANGAN JALAN TOL TRANS-SUMATRA

Seksi	Jarak
Seksi I Padang—Sicincin	28 km
Seksi II Sicincin—Bukittinggi	41 km
Seksi III Bukittinggi—Payakumbuh	36 km
Seksi IV Payakumbuh—Pangkalan	43 km
Seksi V Pangkalan—Bangkinang	56 km
Bangkinang—Pekanbaru	38 km

Jalan Tol Padang—Pekanbaru Terbagi Enam Seksi

- Seksi Padang—Sicincin yang dibangun terlebih dahulu dalam ruas tersebut memiliki nilai investasi hingga Rp4,75 triliun
- Keseluruhan nilai investasi untuk seluruh ruas sebesar Rp60,41 triliun
- Keseluruhan ruas ditargetkan dapat beroperasi penuh pada 2025.
- Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) berkomitmen untuk mendukung konstruksi pembangunan tarowongan sepanjang 8,9 km di wilayah Payakumbuh.
- Perkiraan biaya pembangunan tarowongan US\$700 juta.

Bisnis 2019, Hutama Karya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, PUPR

Judul	Pengadaan Lahan Diefektifkan	Tanggal	9 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 23		
Resume	Pengadaan lahan masih menjadi salah satu kendala yang kerap dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia		

► PROYEK INFRASTRUKTUR

Pengadaan Lahan Diefektifkan

Bisnis, JAKARTA — Pengadaan lahan masih menjadi salah satu kendala yang kerap dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sejumlah upaya pun dilakukan guna menyiasati proses pengadaan lahan menjadi lebih cepat dan efektif.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan bahwa untuk bisa memenuhi target waktu pengadaan tanah dan bahkan bisa lebih cepat, diperlukan usaha dan sinergi lebih optimal dari para pemangku kepentingan.

"Kalau sekarang sudah ada UU [No.2/2012] pengadaan lahan yang memberikan kepastian waktu maksimal dua tahun untuk pengadaan lahan. Namun, sekarang yang menjadi tantangannya adalah ingin waktu lebih cepat lagi. *Nah*, di sini perlu ada kemampuan lapangan yang lebih tinggi dan mekanisme pembayaran yang lebih responsif," ujarnya dalam pesan singkat kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Dalam Undang-Undang Nomor 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan pengadaan lahan itu maksimal dalam jangka waktu itu dua tahun.

BPJT dan LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), lanjut Danang, telah bekerja keras menjawab tantangan tersebut dengan mekanisme pembayar-

an langsung dan juga menggunakan instrumen teknologi informasi untuk verifikasi pembayaran.

"Ke depannya beberapa regulasi akan disederhanakan seperti arahan Presiden [Joko Widodo], agar prosesnya bisa lebih efektif," imbuhnya.

Adapun proses pengadaan hingga dua tahun tersebut adalah proses penetapan lokasi (penlok) oleh Pemerintah Daerah disebutkan dalam Pasal 24 UU No.02/2012 dan dapat diperpanjang maksimal selama satu tahun.

KAWASAN TIMUR

Sementara itu, Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wempi Wetipo mengatakan bahwa secara umum terdapat tiga kendala dalam pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia.

"Kondisi geografis yang lebih berat, kemudian soal keamanan, dan ketiga soal pengadaan lahan. Semoga dengan evaluasi ke depan, masalah ini dapat tertanganii," ujarnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Menurutnya, tingkat pemahaman masyarakat di luar Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih baik terhadap rencana pembangunan yang bermanfaat bagi mereka di masa mendatang. Sedikit berbeda, pemerintah harus memiliki cara khusus

dalam menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur kepada masyarakat KTI.

Menurut Wempi, pendekatan umum seperti tawaran kompensasi berupa ganti rugi lahan biasanya menjadi kendala utama di kawasan perkotaan. Jika kompensasi sesuai dengan keinginan masyarakat maka pembangunan dapat segera dilakukan.

"Berbeda dengan di daerah [KTI], kita harus punya lobi atau strategi khusus kepada mereka untuk melakukan pembangunan. Pendekatan tidak terlalu sulit jika kita menggunakan [unsur] kearifan lokal," katanya.

Pelibatan tokoh masyarakat setempat, lanjutnya, sebagai negosiator dalam proses mediasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai cukup efektif dalam menyampaikan manfaat dan pentingnya pembangunan infrastruktur di kawasan itu.

"Cara komunikasi dan gaya bahasa [tokoh masyarakat setempat] bisa diterima oleh masyarakat, sehingga pembangunan cepat terwujud," imbuhnya.

Selain itu, kata Wamen, konektivitas jalan menjadi kebutuhan yang paling mendesak di KTI mengingat prasarana tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur lainnya seperti proses distribusi bahan bangunan yang lebih murah ketimbang melalui jalur udara. (Aprianus Doni T)

Judul	Jateng Jamin Regulasi dan Lahan	Tanggal	9 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 8		
Resume	Pemprov Jateng tengah meminta pemerintah kota/kab menjamin kenyamanan investor dengan memberikan kepastian regulasi dan perolehan lahan		

► POTENSI INVESTASI

Jateng Jamin Regulasi dan Lahan

Bisnis, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta Pemerintah Kota/Kabupaten menjamin kenyamanan investor dengan memberikan kepastian regulasi dan perolehan lahan.



Hafiyyan
hafiyyan@bisnis.com

Pjs. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Herry Setiadihie mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memacu investasi, jajaran pemerintah daerah harus memberikan kenyamanan dan kepastian bagi investor.

Apalagi, Jawa Tengah ditargetkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pada 2023. Oleh karena itu, butuh investasi besar dalam rangka mendorong ekonomi.

"Dua hal yang perlu ditekankan agar calon investor nyaman, yakni regulasi dan kepastian perolehan lahan," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (5/12).

Dengan estimasi pertumbuhan ekonomi 7%, dibutuhkan investasi langsung atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Rp774 triliun. Pada 2018, pertumbuhan ekonomi Jateng sebesar 5,32% dengan PMTB mencapai Rp413,75 triliun.

Herry menyebutkan persoalan regulasi erat kaitannya dengan perizinan. Perlu adanya sinergi antartingkat pemerintah untuk mempercepat dan menyelaraskan kepastian hukum suatu bisnis.

"Perizinan juga harus cepat, dan kalau perlu berikan insentif. Jangan sampai investor terombang-ambing. Harus bersinergi seluruh pihak," imbuhnya.

Berdasarkan arahan Kepala Negara, ada tiga proyek super prioritas di

Jateng untuk

memacu perekonomian, yakni Kawasan Candi Borobudur, Kawasan Industri (KI) Kendal, yang nantinya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan KI Brebes (KIB).

Menurut Herry, pengembangan tidak hanya berimbas ke tiga lokasi tersebut, tetapi juga wilayah lain di sekitarnya. Misalnya, KEK Kendal turut mendorong perekonomian di wilayah Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur) serta Pantura timur.

Adapun, KI Brebes diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian wilayah Pantura barat dan Cilacap.

Untuk mendukung pengembangan KI Brebes (KIB), DPRD Brebes menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes 2019—2039. Perda tersebut ditetapkan lewat sidang paripurna.

Herry menjelaskan dengan adanya RTRW diharapkan pemerintah setempat mampu menjaga harga lahan agar tidak menjadi ajang spekulasi. Dengan demikian, peruntukan lahan dilakukan secara tepat.

Bupati Brebes Idza Priyanti mengaku lega karena Perda Revisi RTRW tersebut mengalami pembahasan yang cukup alot sebelum ditetapkan. Baik dari pihak legislatif maupun eksekutif saling mempertahankan argumentasinya masing-masing.

"Alhamdulillah di akhir tahun 2019, Perda RTRW melalui rapat paripurna

bisa ditetapkan," tegasnya.

Langkah berikutnya, kata Idza, pihaknya akan mengajukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan rekomendasi. Hal itu sesuai amanat dalam pasal 58 ayat (1) Huruf D Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kepada masyarakat, Idza mengingatkan agar harga tanah di dalam KIB tidak melejit tinggi. Sebab, ada aturan batasan maksimal harga lahan di kawasan industri yang ditetapkan adalah 3 kali lipat dari NJOP di wilayah setempat.

Terkait dengan penetapan Perda RTRW dan KIB ini, Pemkab Brebes tengah mengajukan permohonan pendampingan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perekonomian untuk pengelolaan KIB.

"Seperti, kebutuhan berapa jumlah badan usaha yang mengelola KIB tersebut. Kita minta pendampingan kepada dua kementerian tersebut, termasuk terkait dengan permasalahan lainnya yang menjadi kendala di lapangan," ujarnya.

Anggota Pansus Perda RTRW DPRD Kabupaten Brebes Muhaimin Sadirun menjelaskan ditetapkannya Perda RTRW akan semakin membuka peluang investasi di Kabupaten Brebes. Kucuran investasi diharapkan membuka lapangan pekerjaan, yang muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ■

Judul	Pengoperasian Tol Japek II Mundur ke 20 Desember	Tanggal	9 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 13		
Resume	Pemerintah memundurkan rencana pengoperasian tol layang Jakarta-Cikampek (JepekII) dari semula 15 Desember menjadi 20 Desember.		



PENGOPERASIAN TOL LAYANG ELEVATED-JAKARTA-CIKAMPEK: Suasana Tol Layang (Elevated) Jakarta-Cikampek Km 28, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin. Tol Layang sepanjang 38,1 km itu akan beroperasi pada Jumat (20/12) dengan batas kecepatan 60 km per jam dan pengawasan petugas kepolisian setiap 4 km.

Pengoperasian Tol Japek II Mundur ke 20 Desember

PEMERINTAH memundurkan rencana pengoperasian tol layang Jakarta-Cikampek (Japek II) dari semula 15 Desember menjadi 20 Desember 2019.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya mengatakan pengoperasian mundur dari rencana semula 15 Desember karena masih dilakukan sedikit penyelesaian rambu dan penghalusan jalan.

"Tadi sudah disepakati bahwa operasional awal untuk umum mundur jadi 20 Desember, dengan kecepatan maksimal 60 kilometer per jam," kata Menhub Budi Karya kepada pers di Bekasi, kemarin.

Hal tersebut disampaikan Menhub sesuai bertemu dengan Kementerian PU-Pera, Kakorlantas, dan PT Jasa Marga.

Saat ini penyelesaian tol elevated terus dilakukan sehingga diharapkan tepat pada waktunya bisa digunakan untuk liburan Natal dan Tahun Baru.

Jasa Marga mengingatkan Tol Japek II sepanjang 38 kilometer yang menghubungkan Cikunir-Karawang Timur tidak memiliki gerbang masuk dan keluar di tengah jalan itu.

Mengingat tol elevated sepanjang 38 kilometer tersebut masih baru dan nanti saat digunakan belum 100% selesai, Menhub mengatakan, akan ada petugas setiap 4 kilometer untuk mengawasi kecepatan kendaraan. Kemenhub dan kepolisian,

katanya, akan konservatif untuk mengamankan dan mengingatkan soal keselamatan mengingat kondisi jalan masih baru.

Selain itu, kendaraan yang bisa melalui tol elevated tersebut hanya untuk kendaraan golongan I non-bus, yaitu kendaraan kecil.

"Bus dan truk dilarang lewat tol elevated, tapi hanya lewat tol di bawah. Tol elevated ditujukan untuk menghindari kendaraan yang jalannya lambat, seperti bus dan truk," kata Menhub.

Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani mengatakan, saat ini pihaknya terus berupaya menyelesaikan pembangunan tol elevated agar bisa digunakan tepat waktu.

"Masih ada penyelesaian kecil-kecil yang harus dikerjakan, seperti menghaluskan jalan dan memasang marka jalan," katanya.

Dia mengatakan, walau belum sepenuhnya selesai, tol elevated

sudah memenuhi syarat untuk digunakan kendaraan golongan I.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, juga telah disiapkan ambulans dan kendaraan derek untuk membantu pengguna jalan.

Pihak Jasa Marga juga mengingatkan Tol Japek II sepanjang 38 kilometer yang menghubungkan Cikunir-Karawang Timur tidak memiliki gerbang masuk dan keluar di tengah jalan itu.

Jadi, kalau ada masyarakat yang ingin keluar ke gerbang tol, ke Tambun, Cikarang, Karawang Barat, dan Rengasdengklok misalnya, mereka tidak bisa melakukannya karena tidak ada gerbang tol keluar ke lokasi itu.

Demikian juga, tol elevated tersebut tidak memiliki rest area dan pompa bensin sehingga jalan sepanjang 38 kilometer tersebut memang diperuntukkan perjalanan nonstop. (Ant/E-1)

Judul	2021, Nadiem tidak lagi Urus Sekolah Rusak	Tanggal	9 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 16		
Resume	Dengan melimpahkan urusan rehab sekolah rusak ke PUPR, Kemendikbud bisa berkonsentrasi penuh mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia		

2021, Nadiem tidak lagi Urus Sekolah Rusak

Dengan melimpahkan urusan rehab sekolah rusak ke PU-Pera, Kemendikbud bisa berkonsentrasi penuh mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

ATALYA PUSPA

atalya@mediaindonesia.com

PERBAIKAN sekolah rusak tak lagi menjadi tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai 2021. Dana alokasi khusus (DAK) Fisik pendidikan akan dioper seluruhnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Dengan begitu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bisa fokus memikirkan bagaimana menciptakan SDM unggul dan meningkatkan kompetensi guru sesuai harapan Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud) Didik Suhardi menyatakan hal itu dalam keterangan resminya

seperti dikutip dari laman Kemendikbud, kemarin.

"Tahun 2020, terakhir DAK Fisik ditangani oleh Kemendikbud. Ke depan, Kemendikbud akan fokus pada perencanaan DAK Fisik dan fokus mengerjakan pengembangan proses belajar mengajar di kelas serta memperbaiki kompetensi guru sehingga tercapai percepatan pemerataan kualitas pendidikan," katanya.

Pihaknya akan melakukan perencanaan DAK Fisik secara ketat dan terintegrasi di tahun terakhir pengelolaannya. Apabila anggaran DAK Fisik sudah final, tidak akan bisa direvisi lagi.

Untuk diketahui, alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2020 melalui Kemendikbud sebanyak Rp18.334,6 miliar untuk 536 daerah. Pada 2019, sebagian pekerjaan merehabilitasi

sekolah rusak sudah dilaksanakan Kementerian PU-Pera.

Sudah seharusnya

DAK Fisik diberikan untuk merehabilitasi sekolah yang rusak. Dengan masih kompleksnya masalah pendidikan di Indonesia, pengamat Pendidikan yang juga Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan, mengatakan sudah seharusnya DAK Fisik pendidikan dikelola Kementerian PU-Pera.

Dengan demikian, Kemendikbud dapat berfokus pada pembangunan pendidikan serta kapasitas tenaga ajar di Indonesia. "Ya bagus, harusnya dari dulu begitu. Artinya, Kemendikbud sebagai *user*-nya tetap ikut merancang," ucapnya ketika dihubungi *Media Indonesia*.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyebutkan Indonesia darurat sekolah rusak. Sedikitnya 283 ribu ruang sekolah di Indonesia dalam kondisi rusak. Sebanyak 74 ribu ruang kelas rusak total, 78 ribu ruang kelas rusak berat, dan sisanya rusak sedang. (H-2)

Judul	Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Beroperasi 20 Desember	Tanggal	9 Desember 2019
Media	Tempo, hal 4		
Resume	rencana pengoperasian tol layang Jakarta-Cikampek (JepekII) hanya berlaku untuk kendaraan golongan I		

EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Beroperasi 20 Desember

Hanya berlaku untuk kendaraan golongan I.

EDISI 9 DESEMBER 2019



Pekerja menyelesaikan proyek jalan tol layang Jakarta-Cikampek Km 28, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin.

Mengurangi Kepadatan

JALAN tol layang (elevated) Jakarta-Cikampek II akan dioperasikan secara fungsional pada 20 Desember 2019. Jalan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan yang melintas di ruas jalan tol tersebut akibat rasio jalan yang tak seimbang. Rasio kendaraan yang melintas sekitar 1,3 atau melebihi batas ideal 0,75. Diperkirakan, terdapat 590 ribu kendaraan dari arah Jakarta dan arah Cikampek yang melintas setiap hari.

Profil Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II

- Panjang: 36,40 kilometer
- Nilai investasi: Rp 16,3 triliun
- Kontraktor: PT Waskita Karya (persero) Tbk
- Pengelola: PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek
- Awal pengerjaan: Maret 2017
- Target fungsional: Juni 2019
- Realisasi fungsional: 20 Desember 2019
- Target beroperasi: akhir 2019
- Realisasi fungsional: Januari 2020

Empat Wilayah Pengoperasian Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Wilayah 1

Dari Cawang Kilometer 0 sampai Kilometer 4 di Pondok Gede Timur.

Wilayah 2

Mulai dari Kilometer 4 di Pondok Gede Timur sampai Kilometer 31 di Cikarang Barat.

Wilayah 3

Dari Kilometer 31 di Cikarang Barat sampai Kilometer 47 di Karawang Barat.

Wilayah 4

Mulai Kilometer 47 di Karawang Barat hingga Cipularang Kilometer 66 dan Cikampek Kilometer 72.

● FRANCISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS PAE DALE | SUMBER: Riset, WAWANCARA

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan jalan tol Jakarta-Cikampek II (elevated) akan mulai beroperasi pada 20 Desember 2019. Rencana pengoperasian ini mundur dari target, yaitu pada 15 Desember 2019. "Ada beberapa kendala yang kami lihat, masih ada jalan yang belum rata. Jadi, sisi kenyamanannya masih kurang," ujar dia, kemarin.

Budi Karya mengatakan kecepatan kendaraan yang melintas di jalan tol layang sepanjang 38 kilometer itu akan dibatasi. Kecepatan akan dibatasi rata-rata 60 kilometer per jam. "Sudah disiapkan CCTV (kamera pemantau) di beberapa titik."

Pengendara yang melebihi batas kecepatan, kata Budi Karya, akan dikenai sanksi saat keluar dari jalan tol. Dia menambahkan, jalan tol layang ini hanya dikhususkan bagi kendaraan golongan I nonbus dan nontruk. Selama uji coba pengoperasian, kendaraan yang melintas tidak dikenai biaya.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Istiono, mengatakan pengoperasian jalan tol layang Jakarta-Cikampek membantu mengurangi lalu lintas arus mudik Natal 2019 dan tahun baru 2020. Dia berharap pengoperasian tol layang akan mengurangi kemacetan di ruas jalan tol terpadat ini.

Dalam kunjungan pengoperasian jalan tol layang Jakarta-Cikampek itu hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Jasa Raharja Budi Rahardjo Slamet, dan Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan menggratiskan jalan tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek II). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan penggratisan tarif jalan tol tersebut diberlakukan saat peresmian pengoperasian pekan depan sampai libur Natal dan tahun baru 2020 dan berakhir pada 6 Januari 2020.

Menurut Basoeki, kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan saat libur Natal dan tahun baru. Kementerian akan berkoordinasi dengan Korps Lalu Lintas Polri agar kebijakan itu dapat dipantau dan berjalan dengan tertib. "Jalan tol layang Jakarta-Cikampek itu akan diatur Korlantas," ucap dia.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit, menuturkan target pengoperasian jalan tol layang Jakarta-Cikampek tetap berjalan sesuai dengan rencana, yaitu saat liburan Natal 2019 dan tahun baru 2020. Dia menjelaskan tinggal mendorong untuk pra-uji laik fungsi (ULF). Kontraktor proyek jalan tol tersebut berjanji akhir bulan ini, yakni awal pekan keempat, pengerjaan

Direktur Utama PT JJC Djoko Dwijono mengatakan pengerjaan jalan tol layang sudah mencapai 99,9 persen. Sepanjang jalan tol akan disediakan delapan titik emergency opening dan tangga darurat. Dalam pengoperasian pekan depan, hanya dua titik darurat yang akan dioperasikan sampai pengerjaan rampung.

Proyek jalan tol layang Jakarta-Cikampek II (elevated) dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Acsset Indonusa Tbk (ACST) melalui kerja sama operasi (KSO). Investasi proyek jalan ini sebesar Rp 16,2 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp 13,5 triliun untuk pembangunan konstruksi.

Adapun Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus libur akan terjadi pada 20-24 Desember 2019. Adapun puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 29-31 Desember 2019. Kementerian akan memantau posko angkutan mudik mulai 19 Desember 2019 hingga 6 Januari 2020.

BERITA TERKAIT

Penjualan Semen Domestik Tertekan

Kinerja Pinjaman Teknologi Finansial Terus Melonjak

Chief Executive Officer FinAccel, Akshay Garg:

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Beroperasi 20 Desember

Erick Tunjuk Chatib Basri Jabat Wakil Komisaris Mandiri